

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2005. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 214/KMK/01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara*.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2007. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan*.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2007. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KMK.01/2007 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pusat*.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PM.5/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan*.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan*.
- Fitriandi, Primandita, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Edisi 2011. Jakarta: Salemba Empat.
- <http://www.kppnsurabaya2.org/> (online), diakses tanggal 16 April 2015.
- <http://www.ortax.org> (online), diakses tanggal 31 Mei 2015.
- <http://www.pajak.go.id/content/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-nomor-31-tahun-2012-tentang-pemberian-dan> (online), diakses tanggal 16 April 2015.
- <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/UU-KUP-001-13-UU%20KUP%202013-00%20Mobile.pdf> (online), diakses tanggal 16 April 2015.
- <http://www.span.depkeu.go.id/content/tugas-pokok-dan-fungsi-kppn-pasca-implimentasi-span> (online), diakses tanggal 31 Mei 2015.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Salemba Empat.